

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi adalah suatu konsep yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola urusannya sendiri secara lebih otonom, dengan memindahkan wewenang dari pemerintah pusat. Tujuan desentralisasi yakni supaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Desentralisasi juga membentuk hubungan vertikal dalam struktur pemerintahan, pemerintah daerah berperan lebih dominan dalam mengatur dan mengelola urusan daerahnya. Penerapan kebijakan otonomi daerah di Indonesia adalah contoh nyata dari desentralisasi.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya menafsirkan bahwasanya otonomi daerah yakni kewajiban, hak, dan kewenangan daerah dalam rangka mengurus serta mengelola rumah tangganya secara mandiri. Penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah dari pemerintahan pusat dapat dikatakan sebagai cara untuk mewujudkan kebijakan pemerintah. Penyerahan ini didasari oleh kemampuan dan kondisi daerah masing-masing, sehingga kualitas pelayanan publik dapat meningkat seperti yang diharapkan. Kewenangan otonomi daerah memungkinkan daerah untuk mengambil keputusan dan mengelola urusan internalnya sendiri, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan wilayah tersebut. Dengan begitu, tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah diharapkan selaras dengan keadaan maupun keinginan masyarakat.

Pemberian otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengelola berbagai aspek, termasuk dalam hal peningkatan kesejahteraan, pendapatan ekonomi, serta mendorong daerah untuk terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah masing-masing. Pemberian otonomi yang luas dimaksudkan untuk mempercepat kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai strategi, termasuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, dan penguatan partisipasi masyarakat. Pada hal ini masyarakat harus diposisikan sebagai subjek pemberdayaan, bukan objek pemberdayaan. Artinya, masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan program pemberdayaan, bukan hanya sebagai penerima manfaat.

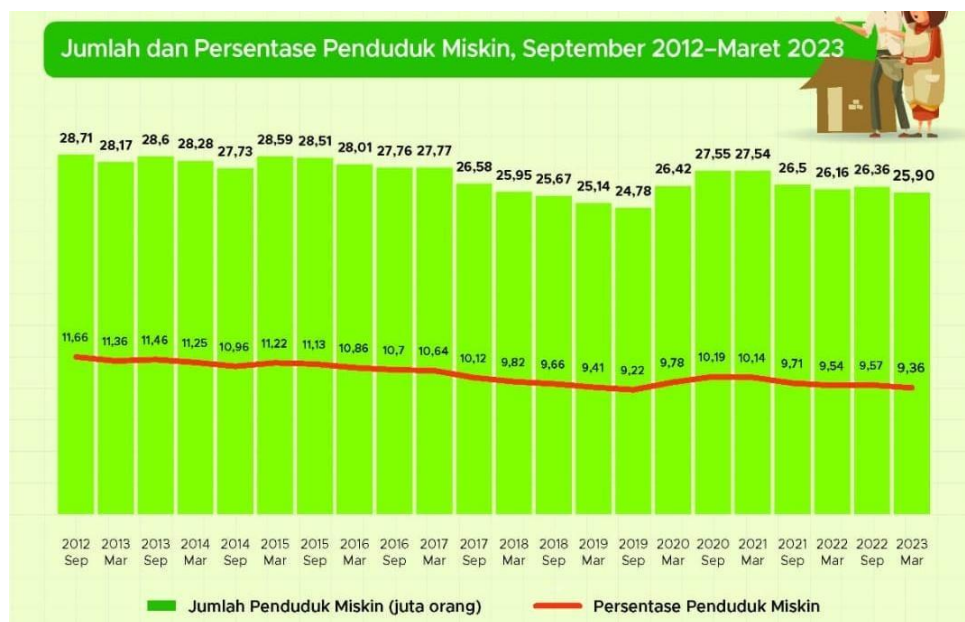
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat 12, pemberdayaan masyarakat desa dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pemahaman, kepribadian, keterampilan, kesadaran, dan kemampuan dengan mengambil manfaat dari sumber daya yang ada. Proses ini dicapai dengan menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan yang tepat, serta mendampingi desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya. Pada proses berjalannya tata pemerintahan Republik Indonesia, desa beberapa kali sudah mengalami perkembangan dalam banyak aspek, sehingga perlu untuk dijaga dan dioptimalkan agar menjadi lebih maju, kuat, demokratis, dan mandiri agar menghasilkan dasar yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Maka dari itu, sangat dibutuhkan adanya jaminan guna mewujudkan

kesejahteraan dan kemandirian desa, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pembangunan masyarakat adalah usaha yang dilakukan agar terciptanya kondisi yang memungkinkan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan lebih mudah dan efektif. Hal ini berhubungan dengan pembangunan masyarakat agar tercipta kesejahteraan adalah dengan pemberdayaan masyarakat dalam rangka memanfaatkan dan mengolah potensi yang ada pada masyarakat. Peningkatan kesejahteraan ekonomi serta pembukaan lapangan kerja baru adalah bentuk kontribusi positif dari potensi alam dan budaya yang dimiliki. Menurut Soleh (2017) potensi didefinisikan sebagai kemampuan, kesanggupan, kekuatan, dan daya yang memungkinkan agar mampu ditingkatkan. Dengan demikian, potensi desa yaitu kemampuan, kesanggupan, kekuatan, dan daya yang diperoleh suatu desa agar bisa dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan sebagai bentuk dari peningkatan kesejahteraan sosial suatu kelompok, khususnya masyarakat desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial diartikan sebagai tercapainya pemenuhan kebutuhan spiritual, material, dan sosial masyarakat sehingga mereka dapat hidup dengan layak, mengembangkan diri, serta menjalankan fungsi sosialnya. Dalam praktiknya, pemberdayaan dilakukan melalui proses mengenali potensi yang ada di daerah tertentu, kemudian mengolahnya menjadi peluang dan kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan wilayah tersebut. Akan tetapi potensi-potensi yang berada di wilayah belum dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat untuk

dijadikan kekuatan daerah tersebut, sehingga potensi ini belum mampu membebaskan Indonesia dari masalah kemiskinan. Kemiskinan dapat terjadi akibat ketidakberdayaan dalam mengakses hal-hal yang dibutuhkan. Melalui pemberdayaan, tingkat kemiskinan dapat ditekan.

Gambar 1. 1 Data Jumlah dan persentase Penduduk Miskin di Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 mencapai 9,36%, yang artinya menurun sebanyak 0,21% daripada September 2022 dan 0,18% dibandingkan dengan Maret 2022. Jumlah penduduk miskin di daerah kota pada Maret 2023 adalah sebesar 7,29%, yang menunjukkan penurunan sebanyak 7,53% dengan September 2022. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di daerah desa pada Maret 2023 adalah sebesar 12,22%, yang juga menunjukkan penurunan dibandingkan dengan September 2022 yang sebesar 12,36%. Dibandingkan dengan September 2022, jumlah penduduk miskin di

perkotaan pada Maret 2023 menurun sebesar 0,24 juta orang, dari 11,98 juta orang pada September 2022 menjadi 11,74 juta orang pada Maret 2023. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya persentase penduduk miskin di daerah desa cenderung tinggi dibandingkan penduduk miskin di daerah kota. Kondisi seperti ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di daerah pedesaan. Cara efektif untuk melaksanakan upaya tersebut adalah dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam yang ada.

Sampai saat ini, masih banyak potensi sumber daya alam yang tidak diolah dengan baik, sehingga pada akhirnya sumber daya tersebut tidak bermanfaat secara optimal di masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam dapat tercapai dengan baik jika mereka mampu memaksimalkan pemanfaatan potensi yang ada, sehingga dapat mencapai tujuan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, yaitu dengan pemberdayaan masyarakat. Pengertian pemberdayaan menurut Mas'ood dalam buku Mardikanto & Soebiato (2019) pemberdayaan dapat dipahami sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu guna memberikan kekuatan kepada masyarakat agar mereka bisa memanfaatkan potensi sumber daya alam dengan baik serta berkelanjutan. Upaya tersebut harus berjalan dengan strategi yang tepat agar masyarakat yang diberdayakan benar-benar mempunyai kapasitas untuk menentukan pilihan dan mengendalikan lingkungannya. Hal ini bertujuan agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dan keinginannya, termasuk mendapatkan

kemudahan mengakses sumber daya yang berkaitan dengan pekerjaan dan aktivitas sosial mereka (Mardikanto & Soebiato, 2019).

Strategi pemberdayaan masyarakat merupakan suatu pendekatan yang komprehensif dan terstruktur, yang melibatkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai (Mardikanto & Soebiato, 2019). Strategi pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga perspektif, yakni: pertama, pemberdayaan masyarakat melalui pemihakan dan peningkatan kapasitas; kedua, pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang berbasis pada partisipasi masyarakat; dan ketiga, modernisasi melalui perubahan struktur sosial ekonomi, budaya, dan politik yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sulistiyani dalam Hidayatullah & Suminar (2021) menerangkan bahwasannya pemberdayaan masyarakat melibatkan beberapa tahapan penting, meliputi: 1) tahap penyadaran dan pembentukan perilaku dengan mengarahkan masyarakat untuk memiliki kesadaran dan kepedulian yang mendorong kebutuhan akan peningkatan kapasitas diri; 2) tahap transformasi kemampuan berfokus pada peningkatan pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan dasar, sehingga masyarakat memiliki wawasan yang lebih luas dan mampu berkontribusi dalam proses pembangunan; dan 3) tahap peningkatan kemampuan intelektual, pada tahap ini, kemampuan intelektual, kecakapan, dan keterampilan masyarakat ditingkatkan untuk membangun inisiatif serta kemampuan inovatif yang mendukung kemandirian.

Dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Secara eksplisit dalam peraturan ini mengatur tentang bagaimana mekanisme pemberdayaan masyarakat desa, dan selanjutnya melalui Peraturan Daerah ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menghimbau agar setiap daerah di wilayahnya bisa memanfaatkan potensi lokal sebagai strategi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal.

Salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi lokal yang melimpah adalah Kabupaten Banjarnegara yaitu potensi buah salak. Wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi daerah penghasil salak antara lain, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Magelang, Kabupaten Wonosobo, dan lain-lain.

Tabel 1. 1 Produksi Salak Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

No	Kabupaten/ Kota	Hasil Produksi Buah Salak (kuintal)		Jumlah (kuintal)
		2020	2021	
1	Banjarnegara	3.774.542	3.149.339	6.923.881
2	Magelang	714.458	597.283	1.311.741
3	Wonosobo	549.283	437.529	986.812
4	Wonogiri	23.368	21.461	44.829
5	Semarang	9.142	33.164	42.306
6	Temanggung	16.342	20.071	36.413
7	Purbalingga	7.668	11.334	19.002
8	Pekalongan	7.189	9.824	17.013
9	Banyumas	4.559	10.755	15.314
10	Pemalang	104	10.307	10.411
11	Cilacap	1.431	6.330	7.761
12	Purworejo	1.445	5.746	7.191
13	Karanganyar	1.345	4.104	5.449
14	Kota Salatiga	833	3.182	4.015
15	Batang	2.160	996	3.156
16	Kebumen	1.260	1.878	3.138
17	Jepara	1.625	1.205	2.830
18	Kendal	1.409	1.406	2.815
19	Boyolali	2.155	418	2.573
20	Brebes	916	955	1.871
21	Klaten	467	420	887
22	Kota Semarang	159	190	349
23	Tegal	90	158	248
24	Kota Magelang	93	104	197
25	Pati	181	-	181
26	Blora	42	36	78
27	Sragen	18	1	19
28	Sukoharjo	-	-	-
29	Grobogan	-	-	-
30	Rembang	-	-	-
31	Kudus	-	-	-
32	Demak	-	-	-
33	Kota Surakarta	-	-	-
34	Kota Pekalongan	-	-	-
35	Kota Tegal	-	-	-
Jumlah		5.122.284	4.328.195	9.450.480

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2022

Dari informasi yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 menegaskan bahwasanya daerah yang menduduki peringkat pertama sebagai wilayah dengan jumlah produksi buah salak tertinggi di tahun 2020 dan 2021 dengan masing-masing sebesar 3.774.542 kuintal dan 3.149.339 kuintal adalah Kabupaten Banjarnegara. Kondisi geografis Kabupaten Banjarnegara yang di kelilingi pegunungan dan termasuk dataran tinggi dengan iklim yang baik menjadi faktor utama mengapa potensi salak sangat melimpah di wilayah ini. Akan tetapi potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan dengan baik dan masih terdapat berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan potensi lokal. Isu ini selaras dengan prioritas strategis pemberdayaan masyarakat desa yang diuraikan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026, yakni meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat. Namun, realisasi swadaya masyarakat dalam program tersebut masih relatif rendah, yaitu sebesar 28%. Upaya mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat yang efektif. Upaya ini meliputi identifikasi dan pengembangan potensi sumber daya alam di tingkat lokal, pengembangan usaha bersama komunitas yang berbasis pada potensi lokal, serta peningkatan kemampuan wirausaha dan masyarakat, termasuk Lembaga Masyarakat Desa, dalam mengelola sumber daya alam secara produktif dan berkelanjutan.

Potensi sumber daya alam yang ada pada daerah begitu sangat melimpah dan beragam, seperti dari hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan potensi

sumber daya alam yang lain. Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah, masyarakat setempat mencapai peningkatan perekonomian dan kesejahteraan mereka. Contohnya, produksi buah salak yang sangat berlimpah di daerah ini telah menjadi salah satu sumber penunjang perekonomian masyarakat. Buah salak ialah buah khas yang berada di Indonesia. Buah salak dalam bahasa inggris lebih dikenal dengan istilah *snake fruit*, hal ini dikarenakan kulit buahnya yang menyerupai sisik ular.

Jenis buah salak yang melimpah di Kabupaten Banjarnegara adalah jenis salak pondoh yang berasal dari Yogyakarta yang mulai dikembangkan sejak tahun 1980-an. Untuk jenis buah salak pondoh yang dibudidayakan di Kabupaten Banjarnegara kebanyakan adalah jenis salak pondoh nglumut yang memiliki ukuran lebih besar dibanding dengan jenis salak pondoh yang lain.

Tabel 1. 2 Produksi Buah Salak Menurut Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara

No	Kecamatan	Produksi (kg)
1	Madukara	161.633.700
2	Banjarmangu	123.192.200
3	Pagentan	93.129.600
4	Sigaluh	20.471.800
5	Karangkobar	17.155.100
6	Banjarnegara	13.020.400
7	Wanadadi	6.945.800
8	Kalibening	5.100.000
9	Pagedongan	4.859.000
10	Punggelan	1.043.200
11	Pejawaran	964.500
12	Wanayasa	219.300
13	Bawang	188.200
14	Susukan	103.600
15	Mandiraja	44.800
16	Pandanarum	9.000
17	Purwareja Klampok	-
18	Purwanegara	-
19	Rakit	-
20	Batur	-
Total		448.080.200

Sumber : BPS Kabupaten Banjarnegara, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita ketahui bahwasannya Kecamatan Madukara menempati posisi teratas sebagai daerah penghasil buah salak terbanyak di Kabupaten Banjarnegara dengan jumlah 161.633.700kg. Dari informasi yang disampaikan terlihat bahwa potensi sumber daya salak menunjukkan kualitas yang sangat baik. Berdasarkan tabel di atas, dapat kita pahami bahwasannya Desa Pakelen di Kecamatan Madukara mempunyai potensi yang besar dalam produksi buah salak, dengan jumlah produksi yang melimpah.

Desa Pakelen adalah sebuah desa yang berada di bawah naungan Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, dalam hal administrasi dan pemerintahan. Menurut data statistik tahun 2023, Desa Pakelen memiliki sekitar 1.509 penduduk, dengan perincian 791 penduduk laki-laki dan 718 penduduk perempuan. Desa Pakelen memiliki luas wilayah sekitar 362.729 Ha dan sebagian besar wilayahnya berupa hutan dan lahan perkebunan. Pendapatan masyarakat di Desa Pakelen berada di kisaran Rp. 2.500.00/bulan/orang dengan mayoritas mata pencaharian mereka adalah sebagai petani. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Desa Pakelen: “Mayoritas warga Pakelen berprofesi sebagai petani, sehingga hidup mereka juga sangat bergantung dengan hasil pertanian. Dari data terakhir yang kami punya menyatakan bahwa 1.081 orang di Desa Pakelen bekerja sebagai petani dan kebanyakan adalah petani salak.”

Kondisi geografis Desa Pakelen yang berada di ketinggian 600 MDPL membuat budidaya buah salak menjadi mudah dilakukan. Terbukti dengan luas lahan perkebunan salak di Desa Pakelen seluas 362.633 Ha menjadikan lebih dari 80% wilayah desa ini merupakan lahan perkebunan salak. Dari luas lahan tersebut produksi buah salak yang mampu dihasilkan adalah sebesar 850 Kg/Bulan/orang.

Berdasarkan informasi di atas, maka terlihat bahwasannya Desa Pakelen memiliki potensi salak yang sangat baik. Buah salak yang dibudidayakan di Desa Pakelen adalah jenis buah salak pondoh nglumut, yang di mana buah salak jenis ini memiliki ciri khas yaitu ukuran buah lebih besar dibandingkan jenis yang lain. Desa Pakelen dikenal sebagai sentra produksi buah salak dengan hasil panen yang melimpah sepanjang tahun. Meskipun produksi salak secara umum dipengaruhi

oleh faktor musiman, Desa Pakelen menunjukkan kecenderungan produksi yang relatif stabil. Selain itu, buah salak yang dihasilkan di Desa Pakelen juga memiliki karakteristik yang unik, yaitu ukurannya yang lebih besar dibandingkan dengan produksi salak di wilayah lain.

Lokasi Desa Pakelen yang berada di pegunungan dengan iklim dingin sedang dan tidak terlalu panas membuat tanah di sekitar wilayah ini terlihat subur, dengan begitu tanaman salak dapat berkembang dengan baik dan mampu mencapai hasil produksi buah salak yang berlimpah pada masa panen di wilayah tersebut. Hasil panen buah salak yang berlimpah merupakan salah satu keunggulan dan potensi besar yang perlu dikelola dengan sebaik-baiknya. Ketika musim panen raya berlangsung, petani salak di Desa Pakelen dapat memanen ratusan kilogram buah salak dari kebun mereka. Hal tersebut juga diimbangi dengan kualitas buahnya yang bagus pula. Dengan potensi ini seharusnya masyarakat mampu memaksimalkan produktivitas buah salak sehingga mampu menjadi sumber pendapatan. Saat ini kebanyakan masyarakat hanya menjual buah salak begitu saja tanpa diolah menjadi olahan yang menarik dan memiliki nilai jual.

Melimpahnya produksi buah salak di Desa Pakelen seharusnya dapat memanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber pendapatan yang potensial jika dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Namun, masalah yang muncul dan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kurangnya tindak lanjut dalam pemanfaatan dan pengelolaan hasil produksi salak. Hal ini menyebabkan harga buah salak turun drastis, sehingga para petani hanya mendapatkan keuntungan kecil, bahkan sebagian dari mereka mengalami kerugian.

Potensi buah salak yang melimpah dengan kualitas buah yang bagus ternyata tidak menjamin kesejahteraan para petani. Kondisi ini terjadi karena harga jual salak di luar musim panen berkisar antara Rp 2.000 hingga Rp 4.000 per kilogram. Namun, saat musim panen tiba, harga buah salak turun drastis, hanya sekitar Rp 1.000 hingga Rp 2.000 per kilogram. Harga buah salak yang tidak pernah meningkat, bahkan tiap tahunnya cenderung semakin menurun menyebabkan para petani semakin tidak sejahtera. Fenomena ini berdampak signifikan pada petani, karena biaya operasional kebun seperti penyerbukan, pemupukan, dan perawatan lainnya relatif tinggi. Sementara itu, pendapatan yang diperoleh dari hasil panen tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, sehingga menyebabkan kerugian bagi petani.

Melimpahnya hasil buah salak perlu disertai tindak lanjut pengolahan salak yang menjadi produk lain dan memiliki potensi menguntungkan jika dijual. Untuk itu, diperlukan pemberdayaan masyarakat di Desa Pakelen dalam mengolah buah salak, sehingga nilai jualnya meningkat dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan para petani.

Tujuan utama dari pemberdayaan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan pemanfaatan, pengelolaan, dan pengembangan potensi di wilayahnya, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan bantuan tersebut, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan produksi dan kapasitas mereka, serta mencapai peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara keseluruhan. (Mardikanto & Soebiato, 2019). Melalui pemberdayaan masyarakat didorong untuk mengembangkan

kemandirian ekonomi dan sosial, sehingga lebih mampu mengelola kehidupan mereka sendiri tanpa ketergantungan yang berlebihan pada pihak lain.

Pemerintah Desa Pakelen telah beberapa kali mengadakan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, salah satunya melalui pelatihan usaha mikro menengah kecil (UMKM) misalnya cara membuat manisan, bakpia, egg roll salak, dodol salak, selai salak, dan lain-lain. Hal tersebut bertujuan agar mampu meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga menambah penghasilan mereka. Namun, minat masyarakat dalam mengikuti pelatihan tersebut masih kurang. Masyarakat di Desa Pakelen masih belum terbuka terhadap perubahan dan inovasi yang diberikan. Mereka cenderung memperlihatkan sikap puas dengan keadaan saat ini, masyarakat kurang berminat untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan yang diselenggarakan. Situasi ini menunjukkan bahwa perlu upaya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pemahaman dan pengetahuan tentang isu-isu yang ada. Dengan begitu, diharapkan masyarakat bersedia dan mampu melakukan perubahan dalam memanfaatkan serta mengelola potensi salak yang dimiliki oleh Desa Pakelen.

Usaha pemerintah Desa Pakelen dalam melakukan upaya-upaya pemberdayaan mengalami beberapa hambatan. Pemerintah desa harus menghadapi hambatan yang pertama adalah masyarakat yang akan diberdayakan belum melek teknologi. Kedua yaitu masih terbatasnya pendanaan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, contohnya dari aparat desa dan pemerintah daerah. Ketiga, komunikasi internal dan eksternal yang dilakukan masyarakat belum berjalan dengan efektif, salah satu contoh komunikasi eksternal yang dilakukan masyarakat

ke pihak eksternal yaitu dinas-dinas terkait, seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara yang masih kurang baik. Kendala keempat yaitu muncul dari masyarakat itu sendiri yaitu kurangnya rasa percaya diri dan masih memiliki rasa ketergantungan kepada pihak lain.

Pemerintah daerah seharusnya berperan lebih aktif dan mengambil langkah yang lebih besar, karena pemerintah yang paling memahami kebutuhan, potensi, dan kondisi masyarakat. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat mengenai pemanfaatan dan pengelolaan buah salak di Desa Pakelen masih berjalan kurang maksimal. Masyarakat membutuhkan upaya dan strategi pemberdayaan yang tepat sehingga mereka mampu mengolah buah menjadi produk bernilai tinggi dan lebih berharga di mata konsumen daripada harus menjual buah salak secara langsung tanpa diolah menjadi apapun. Dengan begitu, masyarakat mampu mengubah potensi salak menjadi peluang dan kekuatan bagi desa tersebut. Pemberdayaan masyarakat di Desa Pakelen juga memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak agar pemberdayaan masyarakat dapat berjalan efektif dan efisien.

Proses pemberdayaan masyarakat tidaklah mudah, melainkan harus adanya berbagai syarat dan rintangan yang harus dipenuhi dan hadapi, hal ini terjadi hampir disemua lapisan desa, tanpa terkecuali Desa Pakelen. Desa Pakelen merupakan desa yang memiliki berbagai potensi yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Namun pada pelaksanaannya dihadapkan dengan masalah utama yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dan aspek dukungan lainnya seperti

kurangnya komunikasi dengan pihak terkait. Upaya dan strategi pemberdayaan masyarakat sangat menentukan keberhasilan pemanfaatan potensi lokal buah salak, sehingga dalam hal ini peneliti tertarik mengangkat penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Buah Salak Di Desa Pakelen Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara”.

1.2 Identifikasi Masalah

Setelah menganalisis latar belakang yang telah dijelaskan, beberapa masalah yang menjadi fokus penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Strategi yang dilakukan oleh dinas terkait dalam melaksanakan pemberdayaan belum optimal.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kondisi yang dialami.
3. Pendanaan untuk melakukan pemberdayaan masih kurang.
4. Komunikasi antara masyarakat dengan pihak terkait belum berjalan efektif.
5. Masyarakat di Desa Pakelen masih belum terbuka terhadap perubahan dan inovasi yang diberikan.

1.3 Rumusan Masalah

Setelah menganalisis uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal buah salak di Desa Pakelen Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal buah salak di Desa Pakelen Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian merupakan hasil atau pencapaian yang diharapkan dari sebuah proses penelitian. Oleh karena itu, mengacu pada rumusan masalah yang telah di sebutkan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal buah salak di Desa Pakelen Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal buah salak di Desa Pakelen Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara.

1.5 Manfaat Penelitian

Melalui penjelasan dan pembahasan dalam penelitian ini, diharapkan hasilnya mampu menyumbangkan beberapa manfaat sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

a. Bagi Pemerintah

Temuan penelitian ini semoga dapat memberikan kontribusi teoritis pada bidang penelitian administrasi publik dengan mengkaji pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal buah salak di Desa Pakelen Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara.

a. Bagi pihak lain

Secara teoritis penelitian ini semoga mampu memberikan gambaran, informasi, serta wawasan teoritis dalam penelitian selanjutnya agar dapat dianalisis lebih lanjut lagi.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dalam hal penerapan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman penulis, memperluas perspektif, dan membekali penulis untuk menerapkan ide-ide yang telah penulis pelajari tentang pemberdayaan masyarakat dan perumusan kebijakan dalam pengelolaan potensi sumber daya.

b. Bagi pembaca

Secara praktis penelitian ini bisa jadi tolok ukur terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan terhadap kebijakan dan strategi pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal.

1.6 Kajian Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang strategi pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal bertujuan untuk memahami bagaimana memaksimalkan sumber daya dan potensi yang berada di tingkat lokal guna meningkatkan kehidupan yang layak bagi masyarakat. Penelitian ini mengeksplorasi terhadap berbagai aspek, mulai dari identifikasi potensi lokal seperti keahlian, tradisi budaya, dan sumber daya alam hingga pengembangan strategi harus memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang berlaku, agar strategi yang dihasilkan dapat efektif dan relevan dengan konteks yang ada.

Penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya memahami dinamika internal masyarakat, struktur kekuasaan lokal, dan pola hubungan sosial dalam merancang strategi yang efektif. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi peran lembaga lokal, organisasi non-pemerintah, dan aktor-aktor lain dalam mendukung pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk memahami dinamika kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerjasama tersebut.

Tabel 1. 3 Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Judul, Nama Jurnal dan Tahun	Tujuan Penelitian dan Metode Penelitian	Teori	Hasil	Perbedaan Penelitian
1.	Peneliti: (Isnaini et al., 2024) Judul Penelitian: <i>Community Empowerment Strategy Based on Local Potential through the Seed Garden Tourism Village Program in Kediri Regency.</i> Nama Jurnal: Indonesian Journal of Adult and Community Education, 5(2), 152-160. Tahun:	Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini adalah mengkaji taktik pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal dengan menggunakan inisiatif desa wisata kebun benih Kabupaten Kediri. Metode Penelitian: Metode yang dipakai pada penelitian ini yakni metode pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif.	Teori pemberdayaan masyarakat (Mardikanto dan Soebiato, 2019) 1. Pembangunan manusia 2. Pengembangan masyarakat 3. Pembangunan kelembagaan kelompok	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan berhasil merubah perekonomian dan pola pikir masyarakat ke arah yang lebih modern. Hal ini tidak lepas dari campur tangan masyarakat yang memiliki wadah organisasi BUMDes. Proses penyadaran masyarakat dilakukan dengan melakukan kegiatan penyuluhan atau workshop terkait pariwisata. Topik utamanya terkait pentingnya kesadaran pariwisata yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemberian pelatihan kepada peserta disesuaikan dengan latar	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dibuat oleh penulis adalah terletak pada teori yang digunakan. Teori penelitian terdahulu ini berfokus pada pembangunan manusia, pengembangan masyarakat, dan pembangunan kelembagaan. Sementara itu, teori penelitian yang akan dikembangkan akan terkonsentrasi pada pengembangan sumber daya manusia, modal komunitas, kelembagaan kelompok, usaha produktif, dan penyebaran informasi relevan.

	2023			belakang minat dan bakat yang dimiliki masyarakat.	
2.	Peneliti: (Pratama, 2021) Judul Penelitian: <i>The Tourism Village Development Strategy Through Community Empowerment In Tiwingan Lama Village, Aranio District, Banjar Regency.</i> Nama Jurnal: Saudi J Econ Fin, 5(7), 277-282. Tahun: 2021	Tujuan Penelitian: Menjelaskan teknik pemberdayaan masyarakat dan mendeskripsikan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Tiwingan Lama di Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar ialah tujuan dari penelitian ini. Metode Penelitian: Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan analisis deskriptif.	Teori partisipasi (Sastropetro, 1995) yaitu masyarakat berperan aktif dalam proses atau alur mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan. Analisis permasalahan menggunakan analisis SWOT	Berdasarkan hasil penelitian, keterlibatan masyarakat di Desa Tiwingan Lama, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar sebagai desa wisata belum berjalan dengan baik. Ketersediaan pemandu wisata dan penginapan bagi pengunjung di Desa Tiwingan Lama yang masih sangat terbatas, konflik dalam pengelolaan Kelompok Sadar Wisata Pesona Riam Kanan, serta sikap dan tindakan warga setempat menjadi kendala dalam upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat. Permukiman Tiwingan Lama masih memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi dan tingkat pengetahuan wisatawan yang masih rendah.	Penekanannya adalah pada hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis. Melibatkan masyarakat dalam pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat ialah penekanan utama penelitian sebelumnya. Sedangkan penelitian yang akan dibuat berfokus pada strategi yang digunakan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal.
3.	Peneliti:	Tujuan Penelitian:	Teori ruang lingkup	Berdasarkan hasil penelitian, Pendapatan Asli Daerah	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang

	(Risaad et al., 2021) Judul Penelitian: <i>Community empowerment strategy in management of swallow's nest cultivation to increase regional original income in Kotabaru District.</i> Nama Jurnal: International Journal of Politic, Public Policy and Environmental Issues, 1(02), 70-79. Tahun: 2021	Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan taktik pemberdayaan masyarakat untuk mengawasi pengembangan sarang burung walet, beserta unsur-unsur yang memfasilitasi dan menghambat pemanfaatannya. Metode Penelitian: Penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif.	pemberdayaan masyarakat (Kartasmita, 1996) 1. Enabling 2. Empowering 3. Protecting Faktor-faktor tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis SWOT.	(PAD) Kabupaten Kotabaru dari usaha budidaya sarang burung walet dan pemberdayaan masyarakat masih sangat kurang. Hal ini disebabkan karena rencana pemberdayaan masyarakat masih banyak kekurangannya. Berikut ini adalah taktik yang dilakukan berdasarkan analisis SWOT: Pendampingan usaha, Perlindungan obyek usaha, Pemetaan potensi sosial secara partisipatif dalam pengembangan usaha budidaya sarang burung walet, Pengorganisasian masyarakat dan fasilitasi penetapan program berkelanjutan, Peningkatan kapasitas masyarakat, Penetapan peraturan, Sosialisasi pemberdayaan, Input (dukungan modal, prasarana, dan sarana), Akses pasar sarang burung walet,	hendak dibuat adalah pada proses analisisnya penelitian terdahulu ini menggunakan analisis SWOT untuk mengembangkan faktor-faktor strategis dalam pemberdayaan masyarakat. Sedangkan penelitian yang hendak dibuat penulis menganalisis pemberdayaan dari sisi strategi yang digunakan dalam menjalankan pemberdayaan masyarakat serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan strategi.
--	--	--	--	--	---

				dan Pengembangan kerjasama/jaringan.	
4.	Peneliti: (Hidayatullah & Suminar, 2021) Judul Penelitian: Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Candi Plaosan Melalui Program Desa Wisata Untuk Kemandirian Ekonomi Di Desa Bugisan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten. Nama Jurnal: Lifelong Education Journal, 1(1), 1-11.	Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini adalah menguraikan taktik pemberdayaan masyarakat, bagaimana pelaksanaannya, apa yang mendorong dan menghambat pemberdayaan, dan seberapa baik desa wisata telah melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Teori strategi pemberdayaan masyarakat (Mardikanto, 2017) 1. Pengembang an SDM 2. Pengembang an kelembagaan 3. Pengembang an usaha produktif 4. Pengembang an modal masyarakat 5. Penyediaan informasi tepat guna	Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan menggunakan lima fase, meliputi pengembangan sumber daya manusia. pengembangan kelembagaan kelompok. pemupukan modal masyarakat. pertumbuhan perusahaan yang sukses. penyediaan informasi penting. penerapan pemberdayaan melalui fase pengayaan, transformasi, dan penyadaran. Partisipasi dalam masyarakat ialah salah satu karakteristik yang mendukung pemberdayaan. Masyarakat yang belum mengenal pariwisata menjadi hambatan. pencapaian dalam ranah budaya, masyarakat, dan ekonomi.	Penekanan penelitian ini adalah pada hal yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya. Pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata menjadi penekanan utama penelitian ini. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan akan difokuskan pada pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal buah salak untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

	Tahun: 2021				
5.	Peneliti: (Naisin & Asyik, 2022) Judul Penelitian: Strategi Pemberdayaan Petani Pala Dalam Meningkatkan Kualitas Tanaman Pala Oleh Dinas Perkebunan Di Kabupaten Fakfak. Nama Jurnal: Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau, Tahun: 2022	Tujuan Penelitian: Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak melaksanakan strategi pemberdayaan masyarakat petani pala dalam rangka meningkatkan kualitas hasil panen pala di daerahnya, sekaligus mengetahui faktor-faktor yang mempermudah dan menghambat proses tersebut. Metode Penelitian: Metode penelitian yang dipakai yakni penelitian kualitatif	Teori tahapan pemberdayaan (Terry Wilson, 1996) 1. Tahapan politis 2. Tahapan organisasi 3. Tahapan individu Tahapan dan strategi lebih lanjut dianalisis menggunakan analisis SWOT.	Meskipun telah berjalan, pendekatan pemberdayaan yang dilakukan Dinas Perkebunan kepada petani pala di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, untuk meningkatkan kualitas panen pala masih belum maksimal. Berdasarkan teori analisis SWOT Freddy Rangkuti, hal tersebut dapat dimaksimalkan dengan menerapkan strategi pemasaran produk pala secara digital dan daring, mewajibkan konsumsi olahan pala, memberikan pelatihan pembuatan aneka olahan pala, dan menyediakan benih pala varietas unggul. Sosialisasi dan pelatihan perawatan tanaman pala juga sangat penting, begitu pula peningkatan kesejahteraan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dibuat oleh penulis adalah terletak pada teori yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan teori tahapan pemberdayaan yang kemudian dianalisis menggunakan analisis SWOT. Sedangkan penelitian yang hendak dilakukan penulis menggunakan teori strategi pemberdayaan masyarakat yang meliputi pengembangan SDM, pengembangan kelambagaan kelompok, pemupukan modal masyarakat, pengembangan usaha produktif, dan penyediaan informasi tepat guna.

		dengan metode deskriptif.		petani melalui pelatihan strategi pemasaran, promosi, dan perdagangan.	
6.	Peneliti: (Yuningsih et al., 2023) Judul Penelitian: Implementasi Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Lubuk Linggau. Nama Jurnal: PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik, 3(1). Tahun: 2022	Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana teknik pemberdayaan masyarakat digunakan dalam pengembangan usaha kecil dan menengah di Kota Lubuklinggau. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Teori kerjasama dalam pemberdayaan (Soekanto, 2012) 1. Integrative 2. Sikap menyukai 3. Simpati dan keinginan saling mambantu	Berdasarkan hasil kajian, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sangat memperhatikan program tersebut dan secara efektif menjalankan rencana strategis untuk pengembangan usaha kecil dan menengah. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat belum membentuk pengelola usaha kecil dan menengah, meskipun telah membentuk panitia kolaboratif untuk mengakomodasi dan mengelola tujuan masyarakat. Pengelolaan usaha kecil dan menengah dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Pemerintah desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berupaya untuk membentuk program kolektif untuk	Penekanan penelitian ini adalah pada hal-hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat menjadi pokok bahasan utama penelitian ini. Sebaliknya, penelitian penulis akan berfokus pada metode yang digunakan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat serta unsur-unsur yang mendukung dan menghambat pelaksanaan strategi tersebut.

				pengembangan pemberdayaan masyarakat.	
7.	Peneliti: (Nasir, et, 2023) Judul Penelitian: Strategi Pemberdayaan Masyarakat Di Kawasan Bandar Bakau Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Nama Jurnal: Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi, 24(1), 41-54. Tahun: 2023	Tujuan Penelitian: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi inisiatif pemberdayaan yang telah diselesaikan dan mengembangkan rencana pemberdayaan berdasarkan gagasan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Metode Penelitian: Metode yang dipakai pada penelitian ini yakni metode kualitatif.	Teori Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) (Junaidin & Mas'ad, 2017)	Berdasarkan hasil kajian, terdapat beberapa permasalahan terkait potensi pemberdayaan masyarakat di Bandar Bakau, seperti perbedaan pendapat terkait tujuan dan struktur pemberdayaan, pengelolaan kelembagaan yang kurang memadai, dan komitmen pemangku kepentingan yang tidak selaras. Karena pemberdayaan lebih banyak dilakukan dengan pendekatan top-down daripada bottom-up, konsep PEMP belum diterapkan dengan baik di wilayah Bandar Bakau. Hal ini berdampak pada kinerja pemberdayaan masyarakat yang kurang baik.	Teori strategi yang digunakan ialah perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis. Teori strategi pemberdayaan berbasis PEMP digunakan dalam penelitian ini, diikuti oleh sejumlah taktik terkait dan analisis SWOT. Sementara itu, penelitian penulis menggunakan teori strategi pemberdayaan masyarakat, yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, pembentukan lembaga kelompok, pemupukan modal masyarakat, pembentukan bisnis yang menguntungkan, dan penyebaran informasi terkait.
8.	Peneliti: (Nasir, et, 2023) Judul Penelitian:	Tujuan Penelitian: Tujuan dari program ini adalah untuk meneliti	Teori optimalisasi pemberdayaan pemuda (Trisani, 2014)	Hasil dari kegiatan ini adalah tim pengabdian masyarakat mampu memetakan potensi Karang Taruna RW 03	Metode analisis yang digunakanlah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis.

	Pemberdayaan Pemuda Berbasis Potensi Lokal Di Desa Kendung Surabaya. Nama Jurnal: Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR), 4, 978-982. Tahun: 2021	bagaimana kelompok pemuda di Desa Kendung dapat bekerja sama dengan potensi lokal daerah Kendung. Metode Penelitian: Metode yang dipakai pada penelitian ini yakni kualitatif dengan metode deskriptif.	1. Kecakapan personal 2. Kecakapan akademik 3. Kecakapan vokasional 4. Kecakapan sosial	Kandung dan memberdayakan mereka melalui berbagai pelatihan dan stimulus. Hasilnya, mereka kini mampu meningkatkan manajemen Karang Taruna dan memiliki situs web yang memungkinkan mereka memasarkan produk usaha, mempromosikan kegiatan, dan menjadi saluran komunikasi antara organisasi mereka dengan dunia luar.	Penelitian ini menganalisis potensi yang dimiliki oleh karang taruna agar mampu membenahi manajemen karang taruna. Sementara penelitian yang penulis angkat berkaitan dengan analisis potensi lokal yang ada di lokasi penelitian.
9.	Peneliti: (Adi et al., 2023) Judul Penelitian: Pemberdayaan Masyarakat melalui pelatihan digital marketing	Tujuan Penelitian: Tujuan dari pengabdian ini adalah memberikan pengetahuan dan meningkatkan minat UMKM Desa Bodag dalam	Teori pengembangan industri dan UMKM (Noor, 2011) 1. Memanfaatkan dana	Dari hasil pelatihan terlihat pengetahuan UMKM akan digital marketing meningkat dari awalnya memperoleh nilai 45,79 menjadi 76,84. Dari sisi keterampilan juga menunjukkan hasil positif dengan indikator mampunya	Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini menjelaskan secara spesifik tahapan lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat

	pada UMKM produk pertanian di desa bodag, Madiun, Jawa Timur. Nama Jurnal: PRIMA: Journal of Community Empowering and Services, 6(2), 126-132. Tahun: 2023	mengembangkan usaha berbasis teknologi melalui digital marketing, serta melakukan pendampingan terhadap UMKM Desa Bodag dalam penerapan digital marketing. Metode Penelitian: Penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif.	2. Sumber daya alam 3. Hasil budidaya 4. Keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup	anggota UMKM di Desa Bodag dalam membuat foto dan katalog produk makanan, serta konten instagram dan website guna pemasaran produk makanan. Kedua hal tersebut menjadi indikator berhasilnya pelaksanaan program ini.	yaitu kegiatan pelatihan digital marketing. Sedangkan penelitian yang hendak dilakukan penulis membahas mengenai strategi pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan potensi lokal dengan melakukan kegiatan pelatihan pembuatan produk UMKM.
10.	Peneliti: (Nisa Aulia Marshanda, 2024) Judul Penelitian: Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengolahan Eceng Gondok Di Kelurahan Jambangan, Kota Surabaya.	Tujuan Penelitian: Penelitian ini memiliki target untuk menggambarkan penguatan kawasan lokal melalui penanganan eceng gondok di Kota Jambangan Kota Surabaya. Metode Penelitian:	Teori penguatan kawasan lokal (Ambar Teguh Sulistiyani, 2004) 1. Tahap Kesadaran dan Pengembangan, 2. Tahap Perubahan 3. Tahap Peningkatan	Hasil dari penyelidikan ini menemukan bahwa penguatan kawasan telah berjalan dengan baik dengan mengikutsertakan kawasan dalam penanganan eceng gondok yang dapat mempengaruhi gaya hidup tandan eceng gondok. Walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala seperti penataan kantor,	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian. Kajian ini berpusat pada hipotesis penguatan kawasan lokal. Sedangkan kajian yang penulis angkat adalah mengenai strategi yang digunakan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal.

	Nama Jurnal: Publika, 198-207. Tahun: 2024	Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini yakni pendekatan kualitatif.	Kapasitas Keilmuan.	yayasan, persiapan, surat menyurat dengan daerah setempat. Studi ini menunjukkan bahwa Kota Jambangan memiliki pilihan untuk fokus pada kebutuhan eceng gondok yang menangani pengumpulan lokal dan kerangka ekologis di kota Jambangan.	
--	---	--	---------------------	--	--

Sumber : Diolah dari Berbagai Jurnal, 2024

Penelitian pertama oleh Isnaini, R. N., Yuliati, N., & Ariefianto, L. (2023) mengkaji taktik pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal dengan menggunakan skema desa wisata kebun benih Kabupaten Kediri. Penelitian ini menemukan bahwa inisiatif pemberdayaan masyarakat berhasil menggeser ekonomi dan mentalitas masyarakat ke arah yang lebih kontemporer.

Penelitian kedua oleh Andie Putra Pratama, dkk (2021) menggambarkan peran aktif masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Tiwingan Lama dan mengidentifikasi strategi pemberdayaan masyarakat yang efektif dalam meningkatkan kualitas desa wisata tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Tiwingan Lama belum optimal.

Penelitian ketiga oleh Muh. Risaad, dkk (2021) membahas strategi pemberdayaan masyarakat dalam mengelola budidaya sarang burung walet, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi strategi tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat masih banyak kekurangannya.

Penelitian keempat oleh Fitra Ayuningtyas H, dkk (2021) menggambarkan strategi pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata, termasuk pelaksanaannya, faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya, serta keberhasilan pemberdayaan tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata melibatkan lima tahap.

Penelitian kelima oleh Misrull Ashary N, dkk (2022) mengembangkan taktik pemberdayaan dan mengevaluasi inisiatif pemberdayaan yang telah dilaksanakan. Penelitian ini menemukan bahwa konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir belum diterapkan dengan baik di wilayah Bandar Bakau.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Anita Yuningsih, dkk (2022) di Kota Lubuklinggau, menunjukkan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berhasil melaksanakan rencana strategis pengembangan usaha kecil menengah melalui program yang telah disusun. Meskipun demikian, lembaga tersebut belum mengembangkan pengelola usaha kecil menengah secara optimal. Penelitian ini berfokus pada fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha kecil menengah, berbeda dengan penelitian yang direncanakan yang akan memfokuskan pada strategi pemberdayaan masyarakat dan unsur-unsur yang mendukung dan menghambatnya.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yaslan, dkk (2023) menemukan bahwa pemberdayaan masyarakat di Bandar Bakau masih belum optimal karena perbedaan pendapat, pengelolaan kelembagaan yang kurang memadai, dan komitmen pemangku kepentingan yang tidak selaras. Penelitian ini menggunakan teori strategi pemberdayaan berbasis PEMP dan analisis SWOT untuk mengembangkan taktik pemberdayaan. Berbeda dengan penelitian yang direncanakan, yang akan menggunakan teori strategi pemberdayaan masyarakat yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, pembentukan lembaga kelompok, pemupukan modal masyarakat, pembentukan usaha produktif, dan penyebaran informasi terkait.

Penelitian kedelapan oleh Fitra Mardiana dan Yuli Ermawati (2021) mengidentifikasi dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh organisasi kepemudaan di Desa Kendung. Penelitian ini menemukan bahwa tim pengabdian masyarakat berhasil mengidentifikasi dan memetakan potensi yang dimiliki oleh Karang Taruna RW 03 Kendung.

Penelitian kesembilan oleh Prakoso Adi, dkk (2023) memberikan pengetahuan dan meningkatkan minat UMKM Desa Bodag dalam mengembangkan usaha berbasis teknologi melalui digital marketing. Penelitian ini menemukan bahwa pengetahuan UMKM akan digital marketing meningkat.

Penelitian kesepuluh oleh Nisa Aulia Marshanda dan Tjitjik Rahayu (2024) menggambarkan penguatan kawasan lokal melalui penanganan eceng gondok di Kota Jambangan Kota Surabaya. Penelitian ini menemukan bahwa penguatan kawasan telah berjalan dengan baik dengan mengikutsertakan kawasan dalam penanganan eceng gondok.

Penelitian-penelitian terdahulu tentang pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa berbagai strategi dan pendekatan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian oleh Isnaini, dkk. (2023) menemukan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan kelompok, pemupukan modal masyarakat, pengembangan usaha produktif, dan penyediaan informasi yang tepat guna. Penelitian lainnya oleh Andie Puta Pratama, dkk. (2021) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang aktif sangat penting dalam

pengembangan desa wisata. Sementara itu, penelitian oleh Muh. Risaad, dkk. (2021) menemukan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat masih banyak kekurangannya, terutama dalam hal pengelolaan kelembagaan dan komitmen pemangku kepentingan. Penelitian-penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pengembangan usaha kecil menengah, pemanfaatan teknologi digital, dan pengelolaan lingkungan. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat memerlukan pendekatan yang mendalam dan berkelanjutan untuk mencapai hasil yang optimal.

Hasil dari penelitian-penelitian terdahulu ini tidak hanya memberikan wawasan tentang praktik terbaik dalam pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal, tetapi juga menyoroti tantangan dan hambatan yang sering dihadapi. Hal ini meliputi masalah seperti ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya, konflik kepentingan, serta kendala institusional dan kebijakan yang menghambat proses pemberdayaan.

Penelitian terdahulu tentang pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal umumnya berfokus pada aspek-aspek tradisional seperti pengembangan keterampilan kerajinan tangan dan pertanian, seringkali menggunakan metode studi kasus pada komunitas tertentu. Pendekatan ini cenderung memberikan wawasan mendalam mengenai praktik lokal namun terbatas dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan dan skalabilitas program pemberdayaan. Di sisi lain, penelitian yang diambil oleh penulis mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif dengan menggunakan metode kualitatif, serta melibatkan komunitas

dengan potensi lokal. Penulis tidak hanya mengkaji keterampilan tradisional, tetapi juga mengeksplorasi potensi ekonomi kreatif dan teknologi digital yang sebelumnya kurang diperhatikan. Penelitian ini menggunakan teori yang relevan dalam bidang pemberdayaan masyarakat, yakni menggunakan teori Pemberdayaan Masyarakat Priyono & Pranarka (1996) dalam Mardikanto & Soebiato (2019) dan dilengkapi dengan teori-teori yang sudah ada sebelumnya, sementara penelitian terdahulu didasarkan pada teori yang lebih konvensional. Perbedaan ini bisa mencakup pendekatan konseptual yang lebih canggih atau pemikiran yang lebih relevan tentang bagaimana masyarakat dapat diberdayakan. Selain itu, penelitian ini memperkenalkan variabel baru seperti struktur pemerintah yang memberikan pemahaman lebih mendalam dan luas dalam memberdayakan masyarakat berdasarkan potensi lokal mereka.

1.6.2 Administrasi Publik

Administrasi publik pada awalnya adalah administrasi negara yang kemudian mengalami pergeseran. Administrasi negara lebih menekankan pada pelayanan yang berorientasi pada pemerintah sehingga bergeser menjadi administrasi publik yang lebih menekankan pada pemberian pelayanan kepada masyarakat. Administrasi Publik menurut Nigro dalam Keban (2019) didefinisikan sebagai upaya kerjasama sekumpulan manusia pada cakupan publik yang memuat eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang memiliki fungsi pokok untuk membuat suatu kebijakan publik hingga terbentuk proses politik, yang mana hal ini membuatnya lain dibandingkan administrasi swasta serta mempunyai hubungan yang dekat bersama individu dan swasta saat menyediakan layanan untuk

masyarakat. Kemudian Woodrow Wilson dalam Keban (2019) mengemukakan bahwa administrasi publik merupakan implementasi hukum yang rigid dan bersistem, dipahami pula bahwa administrasi publik sebagai aturan regulasi, kebijakan, dan praktik dalam bertindak.

Kettl (1993) dalam Keban (2019) mengungkapkan istilah ilmu administrasi publik kerap kali disandingkan dengan birokrasi oleh ahli-ahli ilmu politik. Kata birokrasi lebih terkenal sebab lebih akrab dipahami. Birokrasi juga berasal dari pengertian publik yang mengacu pada orang yang melakukan pekerjaan demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat, dapat dikatakan pula sebagai lembaga pemerintah. Kemudian administrasi publik dapat juga berarti pemerintah yang berperan menjadi aktor tunggal yang memiliki kekuasaan pembuat kebijakan yang memiliki inisiatif untuk membuat aturan dan tindakan yang mana bagi pemerintah memiliki esensi demi kebaikan bagi masyarakat sebab pemerintah mengansumsikan masyarakat berupa aktor yang tidak aktif dan tidak memiliki kapabilitas, serta wajib untuk patuh dalam kebijakan yang dibuat pemerintah.

1. Paradigma Administrasi Publik

Paradigma didefinisikan Kuhn (1970) dalam Keban (2019) sebagai nilai-nilai, cara bagaimana memandang, metode-metode, hingga cara pemecahan masalah yang terjadi yang mana dipercaya oleh sekelompok orang di bidang ilmiah pada kurun waktu tertentu. Adapun dalam perkembangan ilmu administrasi publik beberapa kali telah mengalami pergeseran cara pandang atau paradigma dari yang lama ke yang baru. Menurut Nicholas Henry (1995) seperti yang diungkapkan pula

oleh Robert T. Golembiewski, bahwa dalam konteks disiplin ilmu meliputi fokus dan lokus. Fokus membahas mengenai metode dasar yang dipakai atau tata cara ilmiah yang bisa dipakai guna mengatasi suatu permasalahan. Sedangkan lokus melingkupi tempat metode tersebut dipakai dan diterapkan. Sejauh ini sudah terjadi lima paradigma dalam administrasi publik menurut Nicholas Henry.

Tabel 1. 4 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma	Tahun	Fokus
Paradigma 1 (Paradigma Dikotomi Administrasi dan Politik)	1900-1926	Politik wajib berfokus pada kebijakan yang merupakan pernyataan akan keinginan rakyat. Adapun administrasi memberikan perhatian pada implementasi atau pelaksanaan suatu kebijakan.
Paradigma 2 (Paradigma prinsip-prinsip organisasi)	1927-1937	Prinsip POSDCORB atau Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting. Implementasi prinsip ini tanpa memandang tempat atau universal.
Paradigma 3 (Paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik)	1950-1970	Ilmu politik adalah ilmu yang memiliki dominasi yang tinggi pada ranah administrasi publik.
Paradigma 4 (Administrasi publik sebagai ilmu administrasi)	1956-1970	Terdapat dua arah perkembangan, yaitu orientasi pada pengembangan ilmu administrasi murni yang didorong oleh ilmu psikologi dan ilmu sosial dengan memiliki fokus pada ranah kebijakan publik.
Paradigma 5 (Administrasi Publik)	1970-sekarang	Fokus ilmu administrasi mencakup tiga aspek utama, yaitu teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik.
Paradigma 6 (<i>Governance</i>)	1990-sekarang	Arah perkembangan paradigma ini adalah ke pemerintahan yang baik atau biasa disebut " <i>good governance</i> ".

Sumber: Diolah dari berbagai jurnal, 2025

Dalam penelitian ini, penekanan paradigma administrasi publik yang dipilih adalah paradigma ke enam, yaitu paradigma *governance*. Paradigma ini

menekankan pada pengelolaan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta.

Administrasi publik dan manajemen publik memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi dalam upaya meningkatkan kinerja sektor publik. Administrasi publik berfokus pada implementasi kebijakan, pengaturan birokrasi, dan penyediaan layanan kepada masyarakat dengan menekankan kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang ditetapkan. Di sisi lain, manajemen publik lebih menitikberatkan pada penerapan prinsip-prinsip manajerial seperti perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya, pengukuran kinerja, dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi publik. Kedua bidang ini bekerja secara sinergis untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan dapat diimplementasikan dengan baik dan menghasilkan dampak yang maksimal. Manajemen publik membawa pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif, yang membantu administrasi publik dalam mengatasi tantangan dinamis di lapangan. Dengan demikian, kombinasi dari keduanya memungkinkan pengelolaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat.

1.6.3 Manajemen Publik

Dalam lingkup administrasi publik, khususnya manajemen publik, manajemen publik diartikan sebagai upaya pengelolaan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Follet dalam Dewi & Setianingsih (2018) mengungkapkan bahwa manajemen dilihat sebagai seni untuk penyelesaian pekerjaan lewat usaha orang lain. Artinya, manajer berperan sebagai penggerak tim

yang bekerja sama untuk mencapai sasaran organisasi dan mengoordinasikan tugas-tugas yang diperlukan; mereka tidak melakukannya secara individual. Selain itu, J. Steven Ott, Albert C Hyde, dan Jay M Shafritz dalam Dewi & Setianingsih (2018) mengemukakan bahwa di tahun 1990-an, terjadi masa transisi yang menantang pada manajemen publik. Isu-isu penting seperti privatisasi, rasionalitas, akuntabilitas, perencanaan, kontrol, keuangan, penganggaran, dan produktivitas sumber daya manusia menjadi isu dan fokus utama. Privatisasi dianggap sebagai alternatif pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Organisasi publik mempunyai hubungan yang dekat dengan proses manajemen publik, karena mereka harus dikelola dengan pendekatan manajemen publik, dengan orientasi pada pelayanan publik atau kepentingan publik.

Pelayanan publik memiliki kaitan yang sangat erat dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini juga terkait dengan manajemen publik, karena keduanya memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Manajemen publik memainkan peran penting dalam menciptakan sistem tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, manajemen publik dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui manajemen publik, pemerintah dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan kualitas layanan publik, dan memastikan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. *Good governance* sendiri merupakan prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti partisipasi masyarakat, supremasi hukum, transparansi, daya

tanggap, keadilan, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas. Manajemen publik memiliki tanggung jawab untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut melalui proses perencanaan yang matang, pengorganisasian yang efektif, pengarahan yang tepat, dan pengawasan yang ketat dan berkelanjutan. Dengan demikian, manajemen publik yang efektif akan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan begitu kepercayaan serta kesejahteraan dapat meningkat.

1.6.4 Good Governance

Penting untuk mendefinisikan *governance* sebelum menguraikan konsep *good governance*. Menurut Kooiman (2021), *governance* adalah gagasan interaksi dalam tata kelola, dimana interaksi merupakan suatu hubungan yang menguntungkan dua ataupun lebih aktor ataupun entitas. Keban (2008) dalam (Cahya, 2021) mendefinisikan *governance* sebagai sebuah sistem institusi, kebijakan, serta nilai-nilai yang mengelola permasalahan sosial, politik, dan ekonomi melalui interaksi dengan ranah publik, swasta, dan pemerintahan. Sedangkan *United Nations Development Program* (UNDP) mengartikan *governance* sebagai penggunaan kekuasaan politik, ekonomi, serta administratif pada pengelolaan permasalahan suatu Negara. Terdapat tiga komponen utama yang membentuk lembaga pemerintahan, yaitu pemerintah (negara), sektor swasta, dan masyarakat. Ketiga komponen ini memiliki hubungan yang saling terkait dan memainkan peran penting dalam membentuk sistem pemerintahan yang baik. Domain-domain ini berinteraksi satu sama lain serta melaksanakan perannya masing-masing.

Mardiasmo (2022) mendefinisikan *Good governance* adalah suatu pendekatan yang sistematis dalam mengelola sumber daya sosial dan ekonomi di tingkat nasional guna pengembangan masyarakat untuk mencapai tata kelola yang baik. Agoes dalam (Hanafi, 2022) menggambarkan tata kelola yang baik sebagai metode yang digunakan pemerintah untuk mengontrol interaksi antara tanggung jawab komite, peran direktur, pemangku kepentingan, dan pemegang saham lainnya. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan unggul adalah nama lain dari prosedur terbuka yang digunakan untuk menetapkan tujuan, mengevaluasi hasil, dan mengevaluasi kinerja yang dimaksud dengan “tata kelola pemerintahan yang baik” seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Pasal 2d adalah penerapan dan pemajuan nilai-nilai profesionalisme, keterbukaan, akuntabilitas, demokrasi, mutu pelayanan, efektifitas, efisiensi, dan seluruh lapisan masyarakat dapat menerima dan mengakui supremasi hukum..

Berdasarkan berbagai sudut pandang ahli yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan *Good Governance* adalah cara pemerintah dalam mengatur negara dengan prinsip professional transparansi, akuntabilitas, demokrasi, kualitas layanan, efektif, dan efisien untuk mencapai tujuan pemerintah.

Dalam upaya membangun sistem pemerintahan yang baik di Indonesia, beberapa prinsip penting perlu dijadikan sebagai acuan. Berdasarkan Program Pembangunan PBB (1997), terdapat sembilan prinsip yang harus dipatuhi untuk mencapai *good governance*, yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Seorang pemimpin yang telah dipercayai oleh masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan mereka yang telah dipercayakan kepadanya benar-benar diperhatikan dan diwujudkan.

2. Partisipasi masyarakat

Keterlibatan masyarakat yang aktif dan partisipatif melibatkan serangkaian aktivitas yang memungkinkan mereka untuk mengungkapkan gagasan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan organisasi yang mempunyai kepentingan terkait.

3. Transparansi

Suatu gagasan mendasar yang didasarkan pada tantangan yang dihadapi masyarakat dalam memperoleh informasi guna mengumpulkan informasi tentang kepentingan umum secara langsung dan kuantitatif.

4. Efisiensi dan efektivitas

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, perlu diikuti beberapa gagasan mendasar, yaitu mengorientasikan prosedur dan kegiatan lembaga ke arah yang benar, sehingga sumber daya yang diperlukan dapat diperoleh secara optimal.

5. Kesetaraan

Filosofi ini berarti bahwa semua orang harus diperlakukan dengan sama dan diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan dan perhatian.

Dengan demikian, setiap komunitas memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf hidupnya dan mempertahankan kesejahteraannya.

6. Tegaknya supremasi hukum

Dalam rangka mencapai tata kelola yang efektif dalam proses politik, masyarakat membutuhkan adanya prosedur hukum yang jelas dan pedoman yang memadai dalam merumuskan kebijakan publik. Dalam konteks ini, perundang-undangan hak asasi manusia harus menjadi fondasi dari kerangka hukum yang adil, tidak diskriminatif, dan memihak kepentingan semua orang.

7. Visi strategi

Pandangan strategis tentang masa depan guna memberikan para pemimpin dan masyarakat pemahaman yang lebih komprehensif tentang perbaikan tata kelola dan pembangunan manusia.

8. Responsif

Menurut konsep ini, organisasi harus memiliki komitmen untuk menyelenggarakan pelayanan terbaik kepada semua pihak yang memiliki kepentingan.

9. Berorientasi pada konsensus

UNDP mendefinisikan orientasi kesepakatan sebagai filosofi tata kelola yang baik, yang memungkinkan pemerintah untuk mengatasi konflik dengan menawarkan solusi yang efektif dan disepakati bersama oleh semua pihak yang terkait.

Tata kelola pemerintah bisa dikatakan sudah baik adalah ketika sudah mampu mencapai prinsip-prinsip di atas dan di dalam pengelolaannya semakin menjadi baik. Semua pihak tidak hanya pemerintah harus saling bersinergi agar *good governance* mudah tercapai.

Good governance dan pemberdayaan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam menciptakan lingkungan di mana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dan sejahtera. *Good governance* mengemukakan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan responsivitas, yang semuanya menjadi aspek penting dalam pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan yang berlandaskan prinsip-prinsip *good governance* memungkinkan masyarakat untuk mengambil lebih besar keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan dan akses ke informasi yang lebih luas, dengan cara ini, mereka dapat berpartisipasi secara lebih bermakna dalam isu-isu yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, *good governance* memastikan bahwa mekanisme untuk akuntabilitas ada, sehingga masyarakat dapat menuntut perbaikan ketika ada kebijakan atau layanan publik yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, melalui praktik *good governance*, masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga menjadi agen perubahan yang berdaya untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan umum.

1.6.5 Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sulistiyani dalam Hidayatullah & Suminar (2021) pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata “daya” yang berarti kemampuan atau kekuatan. Dengan memahami konsep ini, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses meningkatkan kemampuan, memberikan kekuatan, atau memperkuat posisi pihak yang kurang berdaya oleh pihak yang memiliki kekuatan. Berkaitan dengan pemahaman konsep pemberdayaan masyarakat, menurut Sulistiyani dalam Hidayatullah & Suminar (2021) esensi dari pemberdayaan masyarakat terdiri dari tiga aspek penting, yakni pengembangan kemampuan (*enabling*), penguatan potensi dan daya (*empowering*), serta diciptakannya kemandirian di masyarakat dengan kewenangan yang terbatas maupun di kelompok tanpa sumber daya yang diperlukan. Dalam hal ini, pemberdayaan tidak terpaku pada masyarakat yang belum memiliki kemampuan, melainkan juga untuk masyarakat yang memiliki potensi terbatas, sehingga dapat dikembangkan dan mencapai kemandirian yang diinginkan.

Chambers dalam Hidayatullah & Suminar (2021) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah gagasan terkait pembangunan ekonomi yang memadukan nilai-nilai sosial yang mengutamakan kepentingan masyarakat, melibatkan partisipasi aktif, memberikan kuasa dan kemampuan, serta berorientasi pada keberlanjutan. Pengertian lain yang disampaikan oleh Tjokrowinoto dalam Hidayatullah & Suminar (2021)

konsep ini tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan pokok (*basic need*), konsep ini juga mencakup upaya untuk mencegah pemiskinan lebih lanjut (*safety need*) dengan menyediakan mekanisme yang tepat. Secara lebih jelas, tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat agar mereka dapat secara mandiri mengatasi berbagai tantangan yang mereka hadapi.

Pemberdayaan masyarakat melibatkan serangkaian proses dan tindakan yang terstruktur untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran individu dalam mengelola kehidupan sosial, ekonomi, dan politik mereka. Tujuan akhir dari proses ini adalah untuk memperkuat posisi dan kedudukan mereka dalam masyarakat, sehingga mereka dapat menjadi aktor perubahan yang efektif dan berdaya dalam memperbaiki kualitas hidup mereka sendiri.

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mardikanto & Soebiato (2019), tujuan pemberdayaan mencakup berbagai upaya memperbaiki, sebagai contoh perbaikan dalam bidang pendidikan dalam bentuk mengembangkan semangat belajar sepanjang hayat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya, perbaikan aksesibilitas akan tercapai jika pendidikan sudah baik, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses inovasi. Setelah itu, perbaikan tindakan masyarakat akan terjadi seiring dengan peningkatan pendidikan dan aksesibilitas. Perbaikan kelembagaan juga akan terwujud, karena dengan adanya perbaikan dalam tindakan, jejaring kemitraan usaha yang efektif dapat menjadi kunci untuk mengembangkan usaha. Perbaikan dalam

pendidikan, aksesibilitas, dan kelembagaan akan memainkan peran penting dalam mencapai perbaikan usaha. Selanjutnya, peningkatan pendapatan dapat dicapai melalui perbaikan usaha yang berkelanjutan, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendapatan yang lebih baik, kondisi lingkungan baik fisik maupun sosial juga akan membaik, mengingat pendapatan rendah seringkali menjadi penyebab kerusakan lingkungan. Kemudian, perbaikan dalam kehidupan akan terjadi setelah adanya perbaikan dalam pendapatan dan lingkungan. Terakhir, perbaikan masyarakat akan tercapai melalui peningkatan dalam kehidupan dan lingkungan. Widiyanti (2012) menyatakan bahwa program pemberdayaan, yakni menjadi upaya guna mengatasi ataupun setidaknya mengurangi dampak negatif dari masalah sosial dalam masyarakat.

Soleh (2017) menjelaskan bahwa tujuan utama pemberdayaan masyarakat yakni: 1) Meningkatkan derajat, harga diri, dan kualitas kehidupan manusia. Peningkatan kualitas hidup ini mencakup tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga mental, keamanan, politik, fisik, dan sosial budaya. 2) Agar tujuan-tujuan dapat tercapai maka ada beberapa prioritas yang harus dicapai, yakni: a) Peningkatan kelembagaan. b) Peningkatan pendapatan. c) Peningkatan lingkungan hidup. d) Peningkatan akses. e) Peningkatan tindakan. f) Peningkatan produktivitas usaha. g) Peningkatan-peningkatan aspek lainnya yang disesuaikan masyarakat dan tantangan yang dihadapi.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat yakni mengubah kondisi masyarakat sehingga mereka memiliki kekuatan di berbagai bidang, yang pada akhirnya mencapai kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan hidup tanpa ketergantungan dengan pihak lain. Dengan strategi pemberdayaan masyarakat yang tepat, kegiatan pemberdayaan akan menjadi lebih efektif dan efisien, disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.

3. Tahap-tahap Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sulistiyani (2004) pemberdayaan masyarakat terdiri dari beberapa tahapan yang perlu dilalui, yakni: 1) Tahap penyadaran. 2) Tahap transformasi. 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual.

Tahap persiapan operasional dan tahap pelaksanaan kegiatan ialah dua komponen utama dalam perencanaan program pemberdayaan masyarakat, menurut Joko Sutarto (2008). Tahap operasional meliputi: 1) memberikan informasi kepada kelompok sasaran atau warga mengenai pelaksanaan kegiatan; 2) menentukan lokasi kegiatan serta menyiapkan berbagai fasilitas pendukung; 3) menyusun materi atau bahan ajar yang relevan untuk mendukung proses pemberdayaan. Sementara itu, tahap pelaksanaan kegiatan berfokus pada perumusan tujuan pemberdayaan dan pengaturan waktu pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan.

Menurut Lippit Mardikanto & Soebiato (2019) proses pemberdayaan masyarakat terdiri dari tujuh tahapan utama. Tahapan tersebut meliputi: meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberadaan mereka,

mengidentifikasi masalah yang ada, membantu mencari solusi atas masalah tersebut, menyadarkan masyarakat akan pentingnya perubahan, menguji serta mendemonstrasikan penerapan perubahan yang telah direncanakan, memproduksi dan menyebarluaskan informasi, hingga akhirnya melaksanakan pemberdayaan itu sendiri.

Menurut Sumodiningrat dalam Hidayatullah & Suminar (2021), proses pembelajaran dalam pemberdayaan masyarakat dilakukan secara bertahap. Tahapan tersebut meliputi:

- a. Tahap pembentukan kesadaran dan perilaku yang mengarah pada rasa peningkatan diri;
- b. Transformasi kemampuan dalam bentuk kompetensi pengetahuan, wawasan, dan keterampilan yang memungkinkan wawasan terbuka dan pemberian keterampilan dasar untuk berpartisipasi dalam pembangunan;
- c. Pada tahap ini, kemampuan intelektual dan inovatif ditingkatkan untuk mencapai kemandirian yang lebih baik.

4. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Strategi adalah sebuah proses bersamaan hasil yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan dan pengendalian berbagai aktivitas yang dilakukan dengan maksud memperoleh keuntungan guna mencapai tujuan (Mardikanto & Soebiato (2019)). Strategi pemberdayaan masyarakat, pada intinya memiliki tiga fokus utama, yakni: Pertama, mendukung serta memberdayakan masyarakat. Kedua, memperkuat otonomi serta pemberian

kewenangan dalam pengelolaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Ketiga, memodernisasi dengan menajamkan arah perubahan dalam struktur sosial-ekonomi, yang mencakup sektor kesehatan, politik serta budaya yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui beberapa strategi, yakni: 1) Menyiapkan alat untuk pengumpulan data, di mana informasi yang dibutuhkan dapat berasal dari hasil penelitian sebelumnya serta referensi yang ada berdasarkan temuan dari pengamatan di lapangan; 2) Mengembangkan pengetahuan dan loyalitas untuk memotivasi kemandirian. 3) Menyiapkan sistem informasi, membuat perangkat analisis, pemantauan serta evaluasi pemberdayaan.

Sedangkan menurut Ismawan (Priyono & Pranarka, 1996) dalam Mardikanto & Soebiato (2019) terdapat lima program strategi pemberdayaan, yakni:

- a. Pengembangan sumber daya manusia, dilakukan melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, baik untuk anggota maupun pengurus kelompok. Pelatihan ini mencakup keterampilan dalam pengelolaan kelembagaan, teknis produksi, dan usaha.
- b. Pengembangan kelembagaan kelompok, mencakup bantuan dalam menyusun mekanisme organisasi, kepengurusan, administrasi, dan peraturan rumah tangga yang sesuai.

- c. Pemupukan modal masyarakat, dilakukan dengan menghubungkan kelompok dengan lembaga keuangan setempat, sehingga dapat mendukung pengumpulan modal secara berkelanjutan.
- d. Pengembangan usaha produktif, melibatkan peningkatan kegiatan usaha dan jasa, pemasaran, serta didukung oleh studi kelayakan usaha dan informasi pasar.
- e. Penyediaan informasi tepat guna, mencakup eksposur program, penerbitan buku, dan majalah yang memberikan wawasan serta inspirasi untuk mendorong inovasi lebih lanjut.

1.6.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat

Faktor yang mendorong dan menghambat pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto & Soebiato (2019), Arsiyah dalam Monica et al (2021), dan Michael Foucault (1975) yaitu:

- a. Sumber daya alam (SDA)
- b. Partisipasi masyarakat
- c. Struktur kekuasaan

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses yang dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan individu maupun kelompok untuk mengambil kendali atas kehidupan mereka, memanfaatkan sumber daya yang tersedia, dan mengambil bagian dalam keputusan yang berdampak pada mereka. Strategi yang efektif dalam pemberdayaan masyarakat melibatkan pendekatan yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan. Ini memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam

pengembangan, pelaksanaan, dan penilaiam proyek atau program. Dengan demikian, strategi ini tidak hanya menekankan hasil jangka pendek, bahkan juga pada penguatan struktur sosial dan peningkatan kemampuan masyarakat untuk mandiri dalam jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat yang berhasil sering kali melibatkan kerjasama antara sektor publik dan komersial guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas.

Strategi pemberdayaan masyarakat akan berhasil jika pemberdayaan masyarakat tersebut mampu memanfaatkan potensi lokal yang ada. Keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain di mana hubungan ini menjadi kunci untuk mencapai pemberdayaan yang efektif dan berkelanjutan. Masyarakat dapat mengoptimalkan sumber daya mereka sendiri sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan mereka.

1.6.7 Potensi Lokal

1. Pengertian Potensi Lokal

Menurut Soleh (2017), potensi dapat diartikan sebagai kekuatan, daya, kemampuan, dan kapasitas yang dihasilkan dan dikembangkan. Dalam konteks ini, potensi desa merujuk pada kemampuan, kesanggupan, kekuatan, dan daya yang dimiliki oleh suatu desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi yang ada. Potensi lokal adalah kemampuan, sumber daya, dan kekuatan yang dimiliki oleh suatu daerah dan dapat dikembangkan untuk mencapai tujuan pembangunan lokal (Martadani Noor, 2018).

Menurut Victorino dalam Hidayatullah & Suminar (2021) potensi lokal dapat diartikan sebagai sumber daya atau kekuatan yang dimiliki oleh setiap daerah yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan. Potensi lokal juga berkaitan erat dengan konsep masukan lingkungan yang mendukung proses pembelajaran. Pemanfaatan potensi lokal yang dilakukan, masyarakat diharapkan akan merasa lebih terhubung dengan lingkungan sekitar mereka, sehingga meningkatkan motivasi untuk mengembangkan program-program pembelajaran yang lebih efektif. Secara garis besar, potensi lokal adalah sumber daya yang tersedia di suatu daerah atau wilayah dan tumbuh dari tradisi serta kearifan lokal masyarakat sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Berdasarkan pada pemahaman Victorino, ciri utama potensi lokal adalah: a) berasal dari lingkungan masyarakat tertentu, b) dirasakan sebagai bagian dari identitas masyarakat, c) selaras dengan alam, d) memiliki nilai universal, e) praktis dan mudah diterapkan, f) mudah dipahami dengan pemikiran sederhana, g) merupakan warisan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Hasil analisis terhadap berbagai penelitian dan pendapat ahli menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan, keterampilan, dan kepercayaan diri masyarakat, sehingga mereka dapat mengambil kendali atas kehidupan mereka sendiri dan mencapai kemandirian yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat melibatkan berbagai aspek, mulai dari ekonomi, sosial, hingga politik, dan bertujuan untuk menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan dalam masyarakat. Dalam

pelaksanaannya, pemberdayaan masyarakat memerlukan strategi yang komprehensif dan terstruktur untuk mencapai hasil yang berkelanjutan.

Strategi pemberdayaan masyarakat secara luas adalah serangkaian pendekatan, metode, dan langkah-langkah yang dirancang guna mengembangkan kemampuan, keterampilan, serta kekuatan masyarakat agar mereka dapat mengontrol dan memperbaiki kondisi kehidupan mereka sendiri secara berkelanjutan. Strategi ini menempatkan masyarakat sebagai subjek utama perubahan, bukan sebagai objek dari intervensi luar, sehingga memberdayakan mereka untuk mengendalikan dan memperbaiki kondisi kehidupan mereka sendiri.

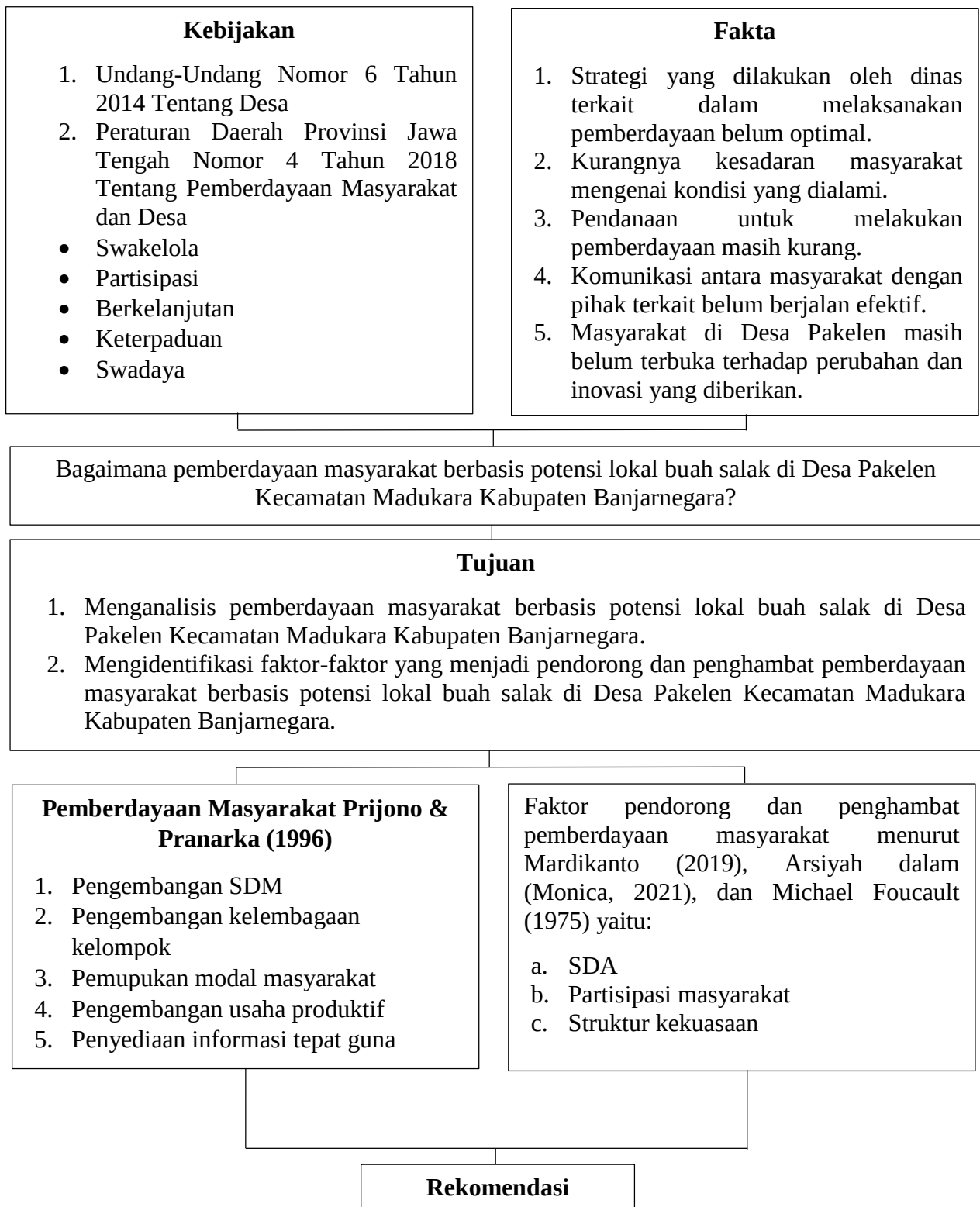
Mengacu pada teori mengenai strategi pemberdayaan masyarakat yang disampaikan oleh beberapa tokoh maupun ahli di atas, maka penulis merangkumnya ke dalam beberapa komponen strategi pemberdayaan masyarakat yang akan dijadikan sebagai bahan analisis penelitian sebagai berikut.

- a. Pengembangan sumber daya manusia
- b. Pengembangan kelembagaan kelompok
- c. Pemupukan modal masyarakat
- d. Pengembangan usaha produktif
- e. Penyediaan informasi tepat guna

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya, dengan meningkatkan kapasitas, keterampilan, kepercayaan diri mereka, dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Potensi lokal, yang mencakup sumber daya alam, budaya, pengetahuan,

keterampilan, dan keunikan lainnya, merupakan basis yang dapat dioptimalkan melalui proses pemberdayaan tersebut. Pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara optimal jika strategi yang diterapkan dapat memanfaatkan potensi lokal dan kondisi masyarakat setempat secara efektif, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Strategi pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal adalah pendekatan yang fokus pada pengembangan dan pemanfaatan sumber daya, keahlian, budaya, dan keunikan yang dimiliki oleh suatu komunitas guna menciptakan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat tersebut. Strategi dibuat dengan maksud guna mengembangkan, menggali, dan mengoptimalkan potensi yang terkandung dalam lingkungan lokal, termasuk sumber daya alam, ekonomi, sosial, dan budaya, dengan begitu masyarakat bisa menikmati manfaat yang optimal dari sumber daya yang mereka miliki. Strategi pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal adalah pendekatan yang mengintegrasikan pengembangan ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh komunitas itu sendiri, sehingga menghasilkan perubahan yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat untuk menjadi lebih mandiri dan berdaya.

1.6.8 Kerangka Pikir



Sumber: Diolah Peneliti, 2024

1.7 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep yang spesifik dari penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal ini menekankan pentingnya pendekatan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan keunggulan dan sumber daya lokal yang tersedia. Pendekatan ini berfokus pada pengembangan kemampuan dan kapasitas masyarakat lokal sehingga mereka dapat mandiri dan berdaya dalam mengelola dan mengembangkan potensi yang ada di lingkungan mereka. Kaitannya dengan analisis pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal tersebut, peneliti memfokuskan untuk melihat pemberdayaan masyarakat melalui lima strategi pemberdayaan, yaitu: pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan kelompok, pemupukan modal masyarakat, pengembangan usaha produktif, dan penyediaan informasi tepat guna.

1. Pengembangan sumber daya manusia

Aspek ini diamati melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, baik untuk anggota maupun pengurus kelompok. Pelatihan dan pendidikan ini mencakup keterampilan dalam pengelolaan kelembagaan, teknis produksi, dan usaha.

2. Pengembangan kelembagaan kelompok

Dalam aspek ini, penelitian mengamati bagaimana suatu organisasi menyusun dan mengatur mekanisme internalnya, seperti peraturan rumah tangga, administrasi, dan kepengurusan, untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

3. Pemupukan modal masyarakat

Aspek ini diamati melalui hubungan kelompok dengan lembaga keuangan setempat, sehingga dapat mendukung pengumpulan modal secara berkelanjutan.

4. Pengembangan usaha produktif

Aspek ini diamati melalui peningkatan kegiatan usaha dan jasa, pemasaran, serta didukung oleh studi kelayakan usaha dan informasi pasar.

5. Penyediaan informasi tepat guna

Aspek ini diamati melalui relevansi, akurasi dan aksesibilitas yang memberikan wawasan serta inspirasi sehingga dapat mendorong inovasi lebih lanjut.

Setelah mengidentifikasi strategi yang akan menjadi pedoman dalam melaksanakan penelitian, maka selanjutnya peneliti akan mengidentifikasi beberapa faktor yang mendorong dan menghambat permasalahan penelitian melalui aspek yang diamati di lapangan.

a. Sumber Daya Alam (SDA)

Sumber daya alam yang diamati pada penelitian ini adalah dari bahan baku yang tersedia sering kali tidak memenuhi standar kualitas yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang kompetitif di pasar. Kualitas yang rendah dapat mempengaruhi daya tahan, estetika, dan fungsi produk akhir, sehingga sulit bersaing di pasar yang lebih luas.

b. Partisipasi masyarakat

Aspek partisipasi masyarakat yang diamati yaitu bagaimana masyarakat terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan berkelanjutan, untuk memahami sejauh mana partisipasi masyarakat dalam program tersebut.

c. Struktur kekuasaan

Struktur kekuasaan diamati melalui pola hubungan dan distribusi kekuasaan antara berbagai aktor yang terlibat dalam proses pemberdayaan, seperti masyarakat, pemerintah, dan pihak lain. Struktur kekuasaan ini mencakup bagaimana keputusan diambil, siapa yang memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan, dan bagaimana peran serta tanggung jawab dibagi di antara berbagai aktor.

1.8 Argumen Penelitian

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan komponen kunci dalam mengoptimalkan potensi lokal buah salak di Desa Pakelen. Hal ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat Desa Pakelen yang sangat bergantung dengan hasil produksi buah salak guna mencukupi keperluan kehidupan mereka. Sebagai salah satu desa penghasil buah salak terbesar di Kabupaten Banjarnegara, seharusnya masyarakat mampu memanfaatkan hal tersebut untuk dijadikan sumber pendapatan. Tapi untuk saat ini kebanyakan masyarakat hanya menjual buah salak begitu saja tanpa diolah menjadi olahan yang menarik dan memiliki nilai jual. Hal ini tentunya mengharuskan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, khususnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil

dan Menengah Kabupaten Banjarnegara dan Pemerintah Desa Pakelen bersinergi mengupayakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan potensi lokal buah salak.

Peneliti melihat pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal buah salak di Desa Pakelen Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara yang masih terdapat beberapa masalah dalam pemberdayaannya, yaitu strategi yang dilakukan oleh dinas terkait dalam melaksanakan pemberdayaan belum optimal, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kondisi yang dialami, pendanaan untuk melakukan pemberdayaan masih kurang, komunikasi antara masyarakat dengan pihak terkait belum berjalan efektif, masyarakat di Desa Pakelen masih belum terbuka terhadap perubahan dan inovasi yang diberikan. Dari hal ini tentunya harus dirancang suatu pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal sebagai upaya untuk mengolah salak menjadi produk dengan nilai jual yang lebih tinggi. Dengan begitu, pemberdayaan yang efektif dalam pengelolaan salak di Desa Pakelen sangat dibutuhkan, agar harga jual buah salak di desa tersebut dapat meningkat dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, yang menurut Bogdan dan Taylor adalah suatu proses yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode yang digunakan menekankan pada proses mencari data/informasi hingga dianggap cukup digunakan untuk mendukung satu penafsiran. Jenis penelitian deskriptif ini

bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara menyeluruh fenomena-fenomena sosial tertentu yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi.

Peneliti berfungsi sebagai alat utama dalam teknik penelitian kualitatif, yang digunakan untuk menyelidiki keadaan alam. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna dibandingkan keumuman, menggunakan triangulasi (kombinasi) sebagai metode pengumpulan datanya, dan menggunakan pengolahan data induktif (Sugiyono, 2018).

Untuk mengkaji secara mendalam strategi pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal buah salak di Desa Pakelen, penulis menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini masuk ke dalam tipe deskriptif kualitatif karena pada penelitian ini berfokus untuk menggambarkan fenomena atau kejadian secara mendalam dengan mengutamakan pemahaman konteks terkait dengan penerapan strategi pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal buah salak di Desa Pakelen Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian yakni tempat dimana penelitian dilaksanakan. Dalam hal ini, Penelitian dilakukan di Desa Pakelen Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara. Desa Pakelen merupakan salah satu desa penghasil buah salak terbanyak dengan kualitas yang bagus dibandingkan lainnya khususnya di Kabupaten Banjarnegara, sehingga peneliti memilih tempat ini. Harga salak yang rendah di pasaran menyebabkan penghasilan masyarakat di desa tersebut tidak

dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pengelolaan dan pemanfaatan buah salak untuk diolah menjadi makanan olahan juga belum berjalan maksimal. Dari permasalahan tersebut maka menarik untuk menganalisis lebih dalam mengenai strategi pemberdayaan masyarakat di Desa Pakelen.

1.9.3 Subjek Penelitian

Individu atau kelompok orang yang akan ditanyai mengenai fakta tertentu atau keyakinan pribadi atau untuk wawancara dikenal sebagai subjek penelitian. Untuk mengetahui informasi mengenai strategi pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal buah salak di Desa Pakelen Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, maka akan dilakukan wawancara terhadap informan penelitian ini. Mengacu pada pengetahuan yang mendalam dan mampu mengartikulasikan realita mengenai item penelitian yang diteliti merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi. Untuk menyelesaikan penelitian ini, peneliti menetapkan subjek penelitian antara lain, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara, masyarakat, dan pihak-pihak yang ikut serta dalam pemberdayaan masyarakat.

1.9.4 Jenis Data

Penelitian semacam ini dikenal sebagai penelitian lapangan karena melibatkan pengumpulan data di lokasi di mana gejala yang diselidiki muncul. Jenis data menurut Sugiyono dalam Muh. Quraisy Mathir (2013) menjelaskan bahwa jenis data penelitian dibagi menjadi :

1. Data Kualitatif

Data kualitatif biasanya dalam bentuk kalimat, huruf, kata, gambar, serta bukan sebuah perhitungan. Data kualitatif biasanya didapatkan melalui serangkaian proses pengamatan, pencatatan, maupun perekaman. Data kualitatif biasanya merujuk pada jenis data yang memberikan pemaknaan sifat maupun karakteristik atas suatu fenomena.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif sangat identik dengan angka setelah melalui serangkaian proses perhitungan, data kuantitatif biasanya dinyatakan dalam bentuk perhitungan dan analisis angka atas beberapa variabel penelitian yang digunakan.

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif dari komentar tertulis atau lisan orang serta observasi perilaku untuk menganalisis strategi pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal buah salak di Desa Pakelen Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara.

1.9.5 Sumber Data

Pada penelitian ini, sumber data asalnya dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara. Sumber data ini dibagi jadi dua kategori, yakni data primer serta data sekunder.

a. Data Primer

Informasi yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian, baik melalui observasi maupun wawancara, disebut sebagai data primer. Dalam hal ini yakni strategi pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal buah salak di Desa Pakelen Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan kumpulan informasi yang telah dikumpulkan dan didokumentasikan oleh pihak lain, sehingga peneliti dapat memanfaatkannya untuk keperluan penelitian. Penelitian ini didapatkan melalui dari pihak ketiga yaitu dokumen-dokumen yang terkait seperti Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara, RPJMD Kabupaten Banjarnegara, dokumentasi pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, swasta, dan masyarakat di Kabupaten Banjarnegara.

Kedua jenis data ini digunakan secara bersamaan untuk memberikan gambaran yang lengkap dan komprehensif mengenai topik penelitian yang sedang diteliti. Dengan menggunakan data primer, peneliti dapat memperoleh informasi yang langsung dan spesifik dari objek penelitian, sehingga dapat meningkatkan keakuratan dan kedalaman analisis. Sementara itu, data sekunder dapat digunakan untuk memperkaya pemahaman dan analisis penelitian dengan menyediakan pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Dengan menggabungkan kedua sumber

data ini, peneliti dapat mendapatkan hasil penelitian yang lebih berimbang dan dapat diandalkan.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono menekankan bahwa metode pengumpulan data yang lebih alami dan otentik seperti observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi lebih efektif dalam mengumpulkan data yang valid. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data yang berbeda, yaitu dokumentasi, wawancara, dan observasi. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh informasi yang lengkap dan akurat untuk mendukung penelitian ini.

- a. Observasi (pengamatan langsung), khususnya pengumpulan informasi melalui observasi langsung di lapangan dan pendokumentasian permasalahan terkait strategi pemberdayaan masyarakat di Desa Pakelen Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara.
- b. Interview (Wawancara), Wawancara terstruktur dilakukan terhadap perwakilan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara, sektor komersial, masyarakat umum, dan pihak lain yang terlibat pada pemberdayaan masyarakat. Untuk melakukan kegiatan wawancara terstruktur ini, materi pertanyaan harus disiapkan terlebih dahulu. Dalam wawancara, informan ditanyai langsung oleh pewawancara untuk mengumpulkan data, dan tanggapan informan direkam atau ditangkap melalui alat perekam. Untuk memudahkan pengolahan data, peneliti akan menggunakan prosedur wawancara terstruktur, yang meliputi perumusan pertanyaan wawancara terlebih

dahulu. Selain itu, karena pekerjaan akan lebih terbuka, peneliti juga akan menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, yang berguna untuk mengetahui sifat sebenarnya dari jaringan sosial.

- c. Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan informasi mengenai berbagai aspek kinerja pemerintah dalam menyusun program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal di Kabupaten Banjarnegara dari sejumlah buku bacaan, makalah, dan sumber lain yang relevan dengan item penelitian di lokasi penelitian.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Setelah terkumpul seluruh data utama dan data sekunder yang kemudian penulis olah kembali, maka teknis analisis data pun selesai. Menganalisis data berarti mengaturnya, membaginya menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola, dan mencari tren serta tema yang berulang. Dengan kata lain, kesimpulan yang luas dapat diambil dari data yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal buah salak di Desa Pakelen Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara secara keseluruhan. Data ini mewakili penemuan-penemuan baru yang sebelumnya tidak diketahui dan sekaligus memberikan solusi atas segala rumusan permasalahan yang telah dibuat sejak awal.

Proses mengumpulkan dan menganalisis data untuk memperoleh kesimpulan yang jelas dan dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain merupakan langkah penting dalam memperoleh pengetahuan yang akurat. Proses ini dikenal sebagai metode analisis data, yang memungkinkan kita untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna dan dapat dipahami. Di sisi lain, metode

induktif dalam menganalisis data kualitatif membangun hipotesis dari pola hubungan tertentu dalam data. Menurut Miles dan Huberman (dalam buku Sugiyono), reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data merupakan contoh tugas-tugas yang interaktif dan tidak ada habisnya dalam analisis data kualitatif yang dilakukan hingga data jenuh.

Oleh karena itu, peneliti menggunakan pendekatan analisis data dalam penelitian ini, khususnya langkah-langkah pengumpulan data.

- a. *Data collecting* (Pengumpulan Data) yakni tahap pengumpulan data yang melibatkan dokumentasi, wawancara, dan observasi. Ketika alat utama untuk mengumpulkan data adalah peneliti. Anda mendapatkan lebih banyak data yang terdiversifikasi semakin lama anda berada di lapangan. Sama seperti perasaan dan sentimen yang tidak selalu terlihat, data juga dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu data yang dapat diamati secara langsung dan data yang tidak dapat diamati.
- b. *Data reduction* (Reduksi Data) secara spesifik memilih apa yang penting, memusatkan perhatian pada hal tersebut, dan merangkum informasi penting. Dalam proses reduksi data, laporan lapangan yang panjang dan rinci disaring untuk memperoleh informasi yang paling penting. Proses ini melibatkan pemilihan data yang relevan, pengidentifikasian tema atau pola, dan penyusunan data secara lebih sistematis. Dengan demikian, laporan lapangan menjadi lebih mudah dikelola dan dipahami. Proses reduksi data memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi data yang relevan dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang hasil observasi.

Selain itu, reduksi data juga memfasilitasi pengembangan kode untuk elemen-elemen spesifik, sehingga memudahkan analisis data selanjutnya.

- c. *Data display* (Penyajian Data) menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono menyatakan bahwasannya teks naratif adalah metode umum yang dipakai dalam penelitian kualitatif guna menampilkan data. Agar tidak kewalahan dalam proses pengumpulan data, maka perlu dilakukan upaya untuk mengembangkan alat ukur, seperti aturan observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga dapat melihat gambaran besar atau aspek spesifik dari penelitian ini.
- d. Klasifikasi data (Penarikan Kesimpulan dan Klarifikasi) Para peneliti selalu berusaha menafsirkan informasi yang mereka kumpulkan. Oleh karena itu, peneliti mencari tema, pola hubungan, kemiripan, fenomena yang berulang, dan elemen sejenis lainnya. Informasi yang dikumpulkan dari pihak-pihak sejak awal jadi upaya untuk membuat kesimpulan. Kesimpulan harus terus-menerus dikonfirmasi sepanjang proses penelitian sampai diperoleh kesimpulan akhir. Pada awalnya, kesimpulan tersebut masih sangat tentatif dan tidak pasti, namun dengan tambahan fakta, kesimpulan tersebut akan menjadi lebih lengkap.

1.9.8 Kualitas Data atau Validitas Data

Kualitas data dapat dimaknai sebagai keabsahan dan validitas dari suatu data. Menurut Sirajuddin Saleh dalam bukunya menjelaskan bahwa keabsahan data merupakan salah satu pembuktian apakah penelitian tersebut merupakan penelitian yang telah memenuhi kriteria ilmiah ataukah belum (Abdussamad, 2021). Kualitas data dapat dilihat melalui empat kriteria sebagai berikut.

1. *Dependability*, langkah ini berhubungan dengan reliabilitas penelitian. Reliabilitas penelitian dapat tercapai ketika hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain dengan menggunakan proses yang sama, menunjukkan hasil yang konsisten dan serupa. Untuk mencapai reliabilitas ini, perlu dilakukan pengujian yang melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh proses penelitian, mulai dari tahap penentuan masalah, pengumpulan data di lapangan, pemilihan sumber data, analisis data, pengujian keabsahan data, hingga penyusunan laporan hasil penelitian.
2. *Confirmability*, langkah ini berhubungan dengan bentuk objektivitas pengujian kualitatif. Keterkaitan antara proses pengujian hasil penelitian dengan proses penelitian sebelumnya sangat penting. Apabila hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai hasil dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi kriteria konfirmabilitas yang diinginkan.
3. *Credibility*, Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti dapat dipercaya dan diandalkan, sehingga hasil penelitian tersebut tidak dapat diragukan sebagai sebuah

karya ilmiah yang sah dan kredibel. Salah satu hal yang dapat meningkatkan kredibilitas data dan informasi yakni menggunakan bahan referensi yang mendukung informasi dan data yang didapatkan selama proses penelitian berupa perekaman menggunakan kamera maupun alat rekam suara.

4. *Transferability*, merupakan konsep yang terkait dengan validitas eksternal, yang memungkinkan peneliti untuk menilai seberapa besar hasil penelitian dapat diaplikasikan pada konteks yang lebih luas, melampaui batas sampel penelitian.